

**KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, dan prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2025.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diselaraskan dengan:

- 1). Arahana Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
- 2). Arahana RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
- 3). Arahana Tata Ruang, yaitu Arahana Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.
- 4). Arahana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
- 5). Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
 - a. Berkualitas,
 - b. Berkesinambungan,
 - c. Berkelanjutan,
 - d. Berkeadilan,
 - e. Inklusif,

- f. Mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin,
- g. Pengelolaan inflasi,
- h. Pengelolaan Sektor UKM dan UMKM,
- i. Perluasan lapangan kerja, dan
- j. Peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2023 serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

3.1.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2023

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen.

Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023.

Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$ 36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96 persen, 10,52 persen, dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti Rangkaian acara KTT-43 ASEAN, MotoGP Mandalika, World Superbike Mandalika, FIBA Basketball World Cup 2023, Aquabike Jet Ski World Championship 2023, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam; komputer barang elektronik, optik; dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup

tinggi adalah industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri.

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen di dorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan Pemilihan Umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan yang mencapai 18,80 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024

ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkatkan signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi Produk Domestik Bruto Pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

2) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I 2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi dengan pemanfaatan telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan

kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan Standar Pelayanan Minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

3) Rasio Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi

pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

3.1.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025

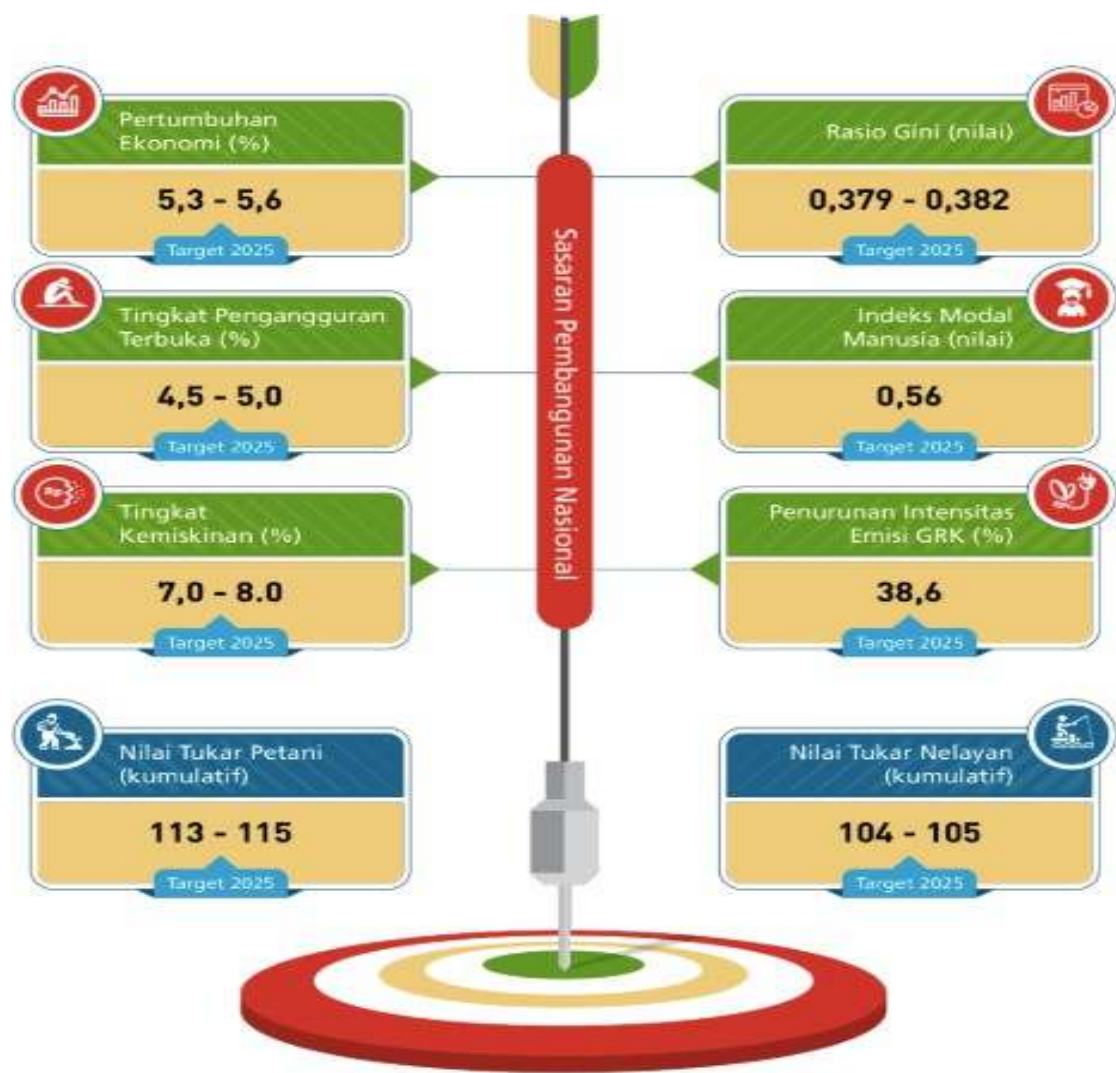
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

Fokus Kebijakan Makro Tahun 2025

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu

dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menyasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

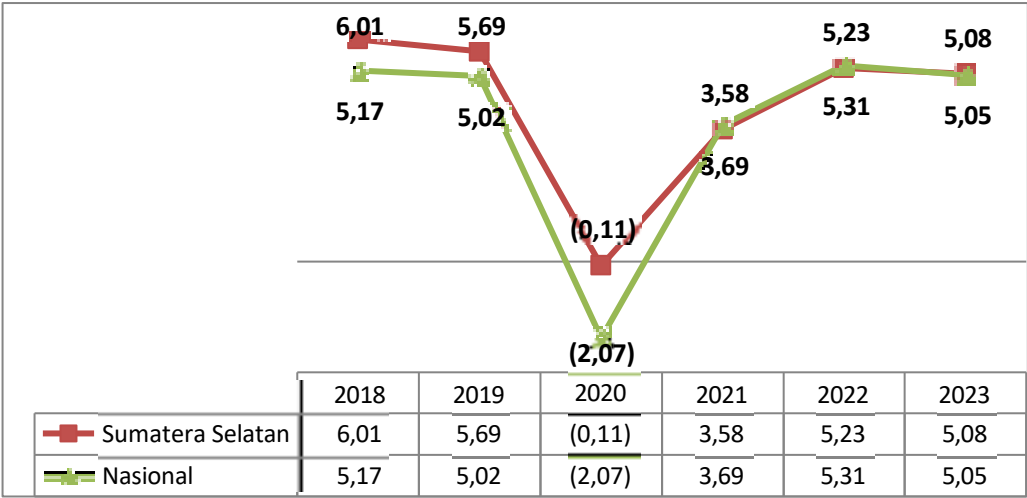
3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbang sebesar 5,23 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas yang signifikan pada tahun 2022 setelah kondisi pandemic COVID-19 mulai terkendali. Pertumbuhan tahun 2023 ini berada diatas nasional yang sebesar 5,05 persen.

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023



Sumber: BPS Tahun 2024

Terlihat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 13,14 persen. Adapun kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral adalah kategori jasa Kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi - 0,02 persen.

Pada kategori yang mendominasi perekonomian yakni kategori pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik yakni sebesar 7,89 persen dan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang kontribusi ekonomi daerah terbesar kedua memiliki capaian 5,04 persen.

Tabel 3. 2
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2018-2023

Kategorie	Produkt	Regionale Verkaufszahlen (in Tausend)						Gesamtwertung (in Tausend)					
		Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20	Q1-21	Q2-21	Q3-21	Q4-21	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22
Elektronik	Smartphone X	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
	Tablet Y	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	Laptop Z	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
	Smartwatch A	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Haarstyling	Shampoo B	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
	Haaröl C	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
	Haarfarbe D	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	Haarstyling E	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Kleidung	Jacke F	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	Hemd G	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
	Hose H	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
	Strick I	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Lebensmittel	Brot J	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410
	Milch K	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
	Obst L	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
	Getränk M	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Spielzeug	Puppe N	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	Auto O	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	Roboter P	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
	Witz Q	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Garten	Blumen R	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
	Werkzeug S	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
	Wasser T	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	Werkzeug U	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2023

Pada tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,61 persen;
- 2) Industri Pengolahan sebesar 17,84 persen;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,45 persen
- 4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,10 persen; dan
- 5) Konstruksi sebesar 10,69 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2023

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2023					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)
V	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2023, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi COVID-19. Adapun pada tahun 2021-2023, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 26,61 persen.

Tabel 3. 4
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65.661,81	68.961,23	72.602,28	78.261,41	82.409,97
B. Pertambangan dan Penggalian	92.166,09	83.282,99	103.801,70	163.503,49	167.379,23
C. Industri Pengolahan	87.834,52	89.705,82	94.212,92	103.515,14	112.204,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575,06	673,04	727,68	751,15	800,02
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	557,98	606,00	594,96	604,09	614,14
F. Konstruksi	56.906,62	56.977,95	58.864,44	62.954,78	67.278,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61.412,85	62.324,46	66.480,85	76.631,82	84.643,23
H. Transportasi dan Pergudangan	11.223,42	10.668,95	10.495,41	13.081,86	15.482,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.937,50	8.519,35	8.933,41	10.470,48	12.044,55
J. Informasi dan Komunikasi	13.177,44	14.936,51	15.852,29	17.142,47	18.257,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.716,05	10.878,28	11.728,23	12.283,33	13.028,56
L. Real Estat	14.462,11	15.202,63	15.984,21	17.127,44	18.072,53
M,N. Jasa Perusahaan	615,14	616,52	623,07	663,62	698,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.100,89	13.181,31	13.653,40	14.530,97	15.276,58
P. Jasa Pendidikan	10.636,67	10.928,19	11.676,22	12.222,59	12.746,35
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.820,44	3.254,87	3.473,37	3.691,86	3.799,28
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.598,13	3.889,29	3.947,37	4.166,98	4.363,52
Produk Domestik Regional Bruto	453.402,71	454.607,40	493.651,91	591.603,48	629.099,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2023, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi 629.099,66 Miliar Rupiah tahun 2023.

Tabel 3. 5
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHB Per Kategori (Miliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277.771,06	296.904,98	296.555,35	307.655,30	347.794,20	381.441,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6.358,15	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32.460,27	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157.634,55	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
5. Perubahan Inventori	-972,55	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-53.859,32	-46.851,48	-40.420,32	-22.000,73	17.960,79	10.622,20
Produk Domestik Regional Bruto	419.392,16	453.402,71	456.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2022 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 381.441,02 miliar rupiah. Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 191.036,81 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3. 6
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHK Per Kategori (Miliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183.420,98	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	4.563,10	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.604,63	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111.301,18	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
5. Perubahan Inventori	-227,60	-319,38	-1.331,43	54,85	-108,83	10,21
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-22.178,22	-15.854,35	-9.667,59	-468,99	7.524,36	10.138,55
PDRB	298.484,07	315.464,75	315.129,22	326.405,18	343.459,88	360.911,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2023 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat menjadi 212.618,53 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2023 menjadi 110.986,58.

Impor

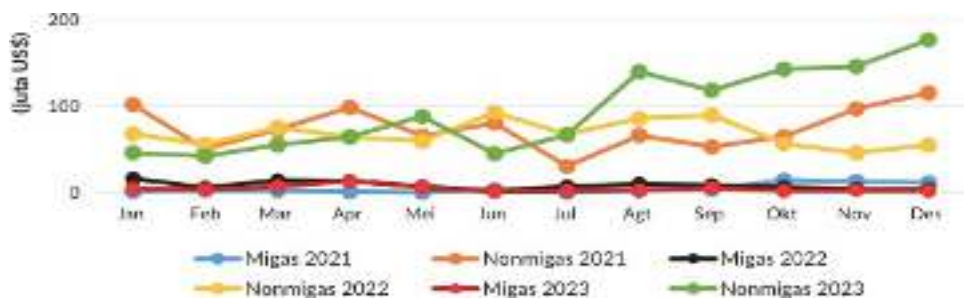
Nilai impor Sumatera Selatan Desember 2023 mencapai US\$179,13 juta atau naik US\$29,81 juta (19,96 persen) dibanding November 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan impor nonmigas yang naik sebesar US\$30,68 juta (20,93 persen). Peningkatan impor nonmigas terutama disumbang oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya sebesar US\$12,96 juta (11,92 persen); dan Karet dan Barang dari karet sebanyak US\$14,04 juta (230,29 persen). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari-Desember 2023 mengalami peningkatan US\$250,72 juta (27,44 persen). Ini disebabkan oleh kenaikan impor nonmigas sebesar US\$306,72 juta (37,56 persen)

Tabel 3.7
Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Januari-Desember 2023

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran Jan-Des 2023 (%)
	Des' 2022	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des' 2022	Jan-Des 2023	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	58.55	149.32	179.13	913.68	1 164.40	205.92	19.96	27.44	100.00
Migas	3.71	2.75	1.88	97.13	41.14	-49.42	-31.79	-57.65	3.53
- Minyak Mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Minyak	3.71	2.75	1.88	97.13	41.14	-49.42	-31.79	-57.65	3.53
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	54.85	146.57	177.25	816.55	1 123.26	223.18	20.93	37.56	96.47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 3.2
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas
Sumatera Selatan Januari – Desember 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Nilai impor nonmigas Sumatera Selatan Desember 2023 yang mencapai US\$177,25 juta, didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya US\$121,70 juta (55,96 persen). Dilihat perkembangannya terhadap November 2023, impor nonmigas mengalami peningkatan US\$30,68 juta (20,93 persen), yang didominasi oleh peningkatan ekspor karet dan barang dari karet sebesar US\$14,04 juta (230,29 persen). Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah barang dari besi dan baja yang turun US\$5,28 juta (57,38 persen).

Tabel 3.8
Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Persen dari Total Impor Jan-Des 2023 (%)
	Des 2022	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des 2022	Jan-Des 2023	year-to-date	month-to-month	quarter-to-quarter	
CU	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASEAN	9.38	18.10	17.39	275.36	241.17	85.46	-3.93	12.42	20.71
1. Malaysia	3.36	2.89	5.75	67.38	74.91	11.74	30.31	11.19	6.43
2. Vietnam	0.10	7.83	0.84	37.21	68.67	738.25	-89.33	63.08	5.21
3. Thailand	2.21	4.71	7.85	66.51	41.88	255.29	66.62	-12.44	3.60
ASEAN Lainnya	3.71	2.68	4.95	81.27	63.70	33.42	84.86	-58.19	5.47
Uni Eropa	1.99	30.67	27.34	31.87	139.16	1,272.32	-10.87	347.93	11.93
4. Finlandia	0.00	19.40	2.88	1.14	40.74	-	-85.41	-	3.50
5. Swedia	0.93	2.32	1.70	1.33	24.00	82.20	-26.54	1708.77	2.06
6. Jerman	0.56	3.12	3.66	7.03	18.94	584.31	9.45	168.43	1.63
Uni Eropa Lainnya	0.50	5.43	18.90	21.53	55.49	-	247.98	157.43	4.77
Negara Utama Lainnya	42.68	98.33	131.70	522.30	746.90	208.56	33.94	44.32	64.11
7. Tiongkok	37.40	85.25	105.06	442.89	622.81	388.94	25.27	40.62	53.49
8. Pantai Gading	0.18	5.76	19.75	28.24	79.60	-	702.84	172.73	6.84
9. Kanada	1.69	1.97	1.32	24.60	18.25	-22.39	-33.29	-25.81	1.57
10. Amerika Serikat	0.53	3.48	0.90	10.52	16.79	85.90	-71.85	59.71	1.44
11. Australia	2.88	1.26	1.59	15.05	9.05	-44.66	26.76	-9.62	0.78
12. India	1.31	0.28	0.22	10.01	8.83	83.36	21.07	41.37	0.76
Total 12 Negara Tujuan	51.16	139.27	152.80	732.92	1016.48	198.67	9.72	46.42	87.30
Lainnya	7.39	10.05	26.33	180.76	147.93	256.10	161.92	-32.59	12.70
Total Impor	58.55	149.32	179.13	913.68	1164.40	205.92	19.96	27.44	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Total nilai impor dari 12 negara utama pada Desember 2023 mencapai US\$146,70 juta atau naik US\$9,68 juta (7,06 persen) dibandingkan November 2023. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan nilai impor dari Tiongkok sebesar US\$22,21 juta (25,87 persen) dan Pantai Gading sebesar US\$13,99 juta (242,94 persen).

Dilihat dari peranannya terhadap total impor Januari-Desember 2023, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Tiongkok dengan nilai US\$622,81 juta (53,49 persen), diikuti oleh Pantai Gading US\$79,60 juta (6,84 persen) dan Malaysia US\$74,91 juta (6,43 persen). Kontribusi yang cukup tinggi berasal dari kelompok negara ASEAN sebesar US\$241,17 juta (20,71 persen) dan Uni Eropa US\$139,16 juta (11,95 persen)

Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 2 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 3,17 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 116,48 pada Desember 2023. Adapun tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2023 sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sama dengan inflasi yoy sebesar 3,17 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 7,22 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 115,35 pada Desember 2022 menjadi 123,68 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 2,20 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: beras sebesar 0,781 persen; cabai merah sebesar 0,416 persen; dan rokok kretek filter sebesar 0,209 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,42 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,08 pada Desember 2022 menjadi 111,64 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,08 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: seragam sekolah anak sebesar 0,013 persen; sepatu wanita sebesar 0,009 persen; dan sepatu anak sebesar 0,008 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,77 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,32 pada Desember 2022 menjadi 109,22 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,31 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: tarif air minum PDAM sebesar 0,300 persen; sewa rumah sebesar 0,063 persen; dan kontrak rumah sebesar 0,013 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,44 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 113,42 pada Desember 2022 menjadi 113,92 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: pengharum cucian/pelembut sebesar 0,014 persen; panci dan lemari pakaian masing-masing sebesar 0,008 persen.

Kelompok kesehatan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,34 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,52 pada Desember 2022 menjadi 109,97 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: obat dengan resep sebesar 0,035 persen; tarif *check up* sebesar 0,005 persen; obat batuk dan alat KB lainnya masing-masing sebesar 0,001 persen.

Kelompok transportasi pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,07 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 120,34 pada Desember 2022 menjadi 120,43 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: tarif kendaraan travel sebesar 0,015 persen; mobil sebesar 0,007 persen; dan angkutan antar kota sebesar 0,006 persen.

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,39 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,80 pada Desember 2022 menjadi 102,20 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan

andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: biaya pulsa ponsel sebesar 0,017 persen; biaya jaringan saluran TV dan telpon selular masing-masing sebesar 0,001 persen.

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,53 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 116,25 pada Desember 2022 menjadi 116,87 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: kertas HVS dan buku tulis bergaris masing-masing sebesar 0,003 persen; pulpen/ballpoint dan pensil hitam masing-masing sebesar 0,002 persen.

Kelompok pendidikan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 2,85 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 114,86 pada Desember 2022 menjadi 118,13 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: sekolah menengah atas sebesar 0,076 persen; bimbingan belajar sebesar 0,047 persen; dan kursus bahasa asing sebesar 0,011 persen.

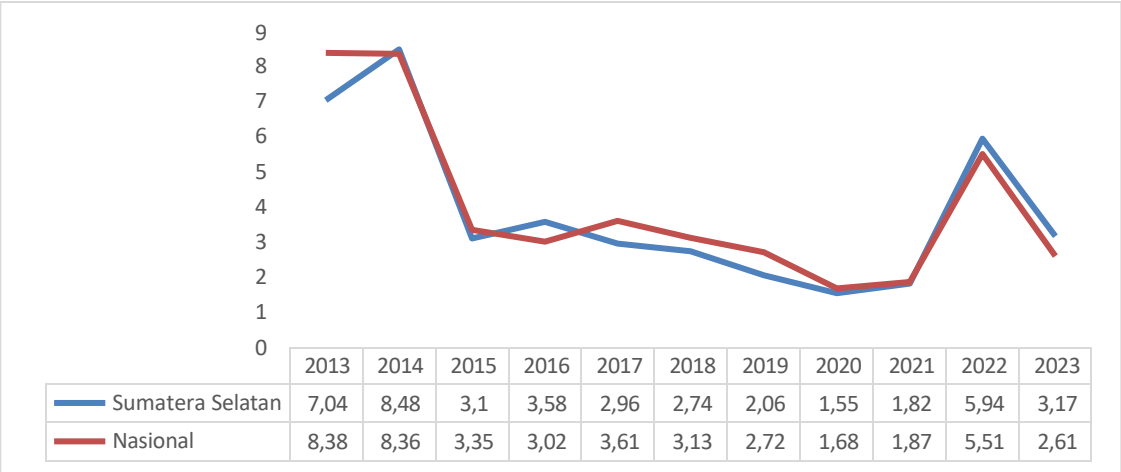
Kelompok penyediaan makanan dan minuman pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,28 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,90 pada Desember 2022 menjadi 112,32 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu : pempek sebesar 0,020 persen; ayam goreng dan kue kering berminyak masing-masing sebesar 0,014 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 3,74 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,11 pada Desember 2022 menjadi 123,56 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,23 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu : emas perhiasan sebesar 0,108 persen; sabun mandi sebesar 0,038 persen; dan pasta gigi sebesar 0,022 persen.

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional tetapi di tahun 2022 dan 2023 angka inflasi berada

diatas nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (yoy), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94 dan pada tahun 2023 sebesar 3,17 persen Angka Inflasi Sumatera Selatan telah melebihi angka Inflasi di Nasional.

Gambar 3.3
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023

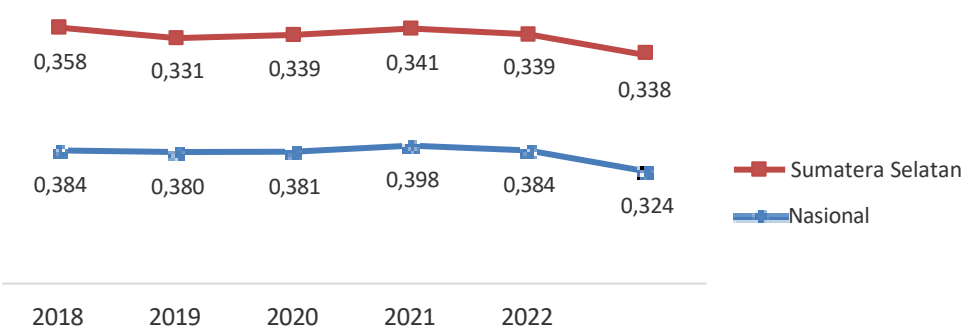


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2018-2023 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode September 2021-September 2023 angka gini ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 0,338.

Gambar 3.4
Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2018-2023



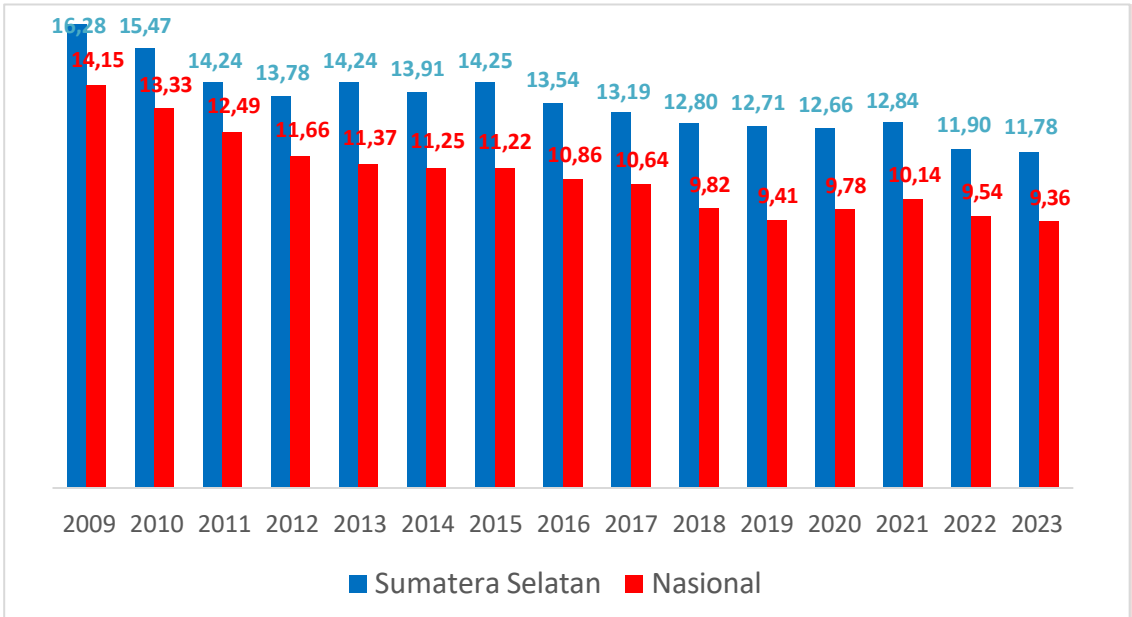
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,339 keadaan September 2022 menjadi 0,338 keadaan September 2023 atau turun 0,001 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2023 mencapai 11,78% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada Maret 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2022 yang sebesar 12,95%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Hal ini merupakan salah satu dampak dari pemulihan aktivitas ekonomi akibat pelonggaran pembatasan kegiatan karena kasus COVID-19 yang perlahan-lahan mereda. Secara Umum, tren pertumbuhan penduduk miskin di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan yang diikuti oleh kenaikan nominal garis kemiskinan.

Gambar 3. 5
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2009-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Tabel 3. 9
Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan Tahun 2023

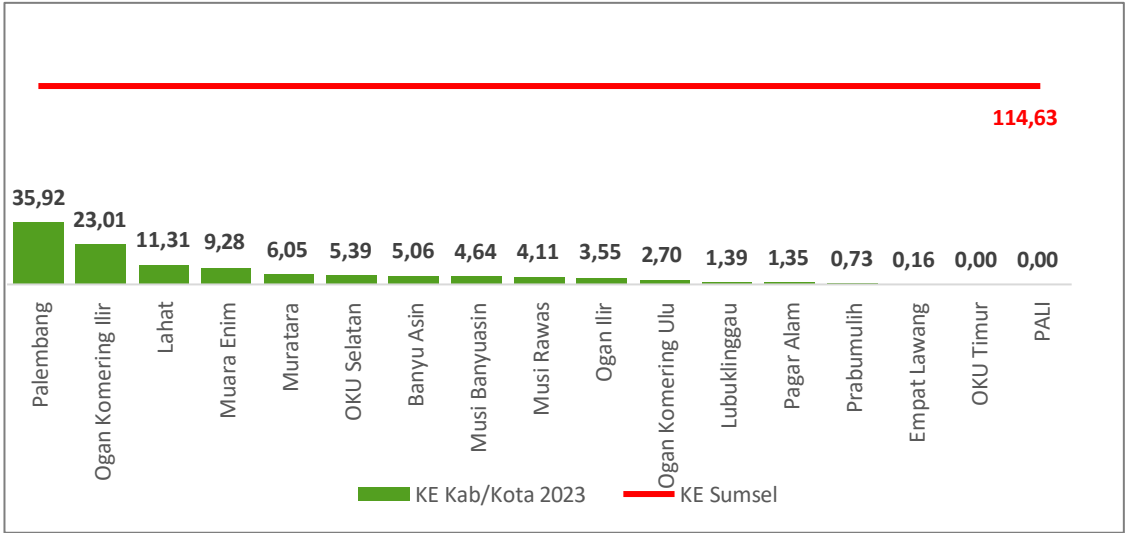
Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
SUMATERA SELATAN	1045,68	520,754	1,72	0,39
Ogan Komering Ulu	44,11	548,200	1,59	0,36
Ogan Komering Ilir	114,48	444,881	2,91	0,83
Muara Enim	73,24	467,396	1,92	0,46
Lahat	63,36	547,203	2,49	0,63
Musi Rawas	59,75	564,151	1,99	0,42
Musi Banyuasin	101,63	593,258	1,77	0,34
Banyu Asin	85,88	509,264	1,20	0,26
OKU Selatan	39,30	413,228	1,86	0,58
OKU Timur	69,91	410,548	0,92	0,15
Ogan Ilir	59,33	571,657	1,48	0,30
Empat Lawang	30,78	411,191	1,15	0,19
Penukal Abab Lematang Ilir	1,72	487,341	0,99	10,14
Musi Rawas Utara	36,68	604,903	3,33	0,86
Kota Palembang	179,45	643,356	2,06	0,57
Kota Prabumulih	22,33	649,951	1,48	0,27
Kota Pagar Alam	12,73	408,917	1,11	0,24
Kota Lubuklinggau	31,02	583,867	1,49	0,22

Sumber: BPS RI, 2023

Selain penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini juga fokus terhadap percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat mencapai 0% pada tahun 2024 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Dalam Inpres ini diinstruksikan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga serta seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penyiapan data serta penyusunan program dan kegiatan dan pengalokasian anggaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*).

Berdasarkan data Susenas BPS, tingkat kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 1,29 persen dengan fokus wilayah penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2023 dan di 2024 di seluruh 17 Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan sesuai dengan Kepmenko PMK RI Nomor 25 Tahun 2022.

Gambar 3. 6
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem
di Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2023



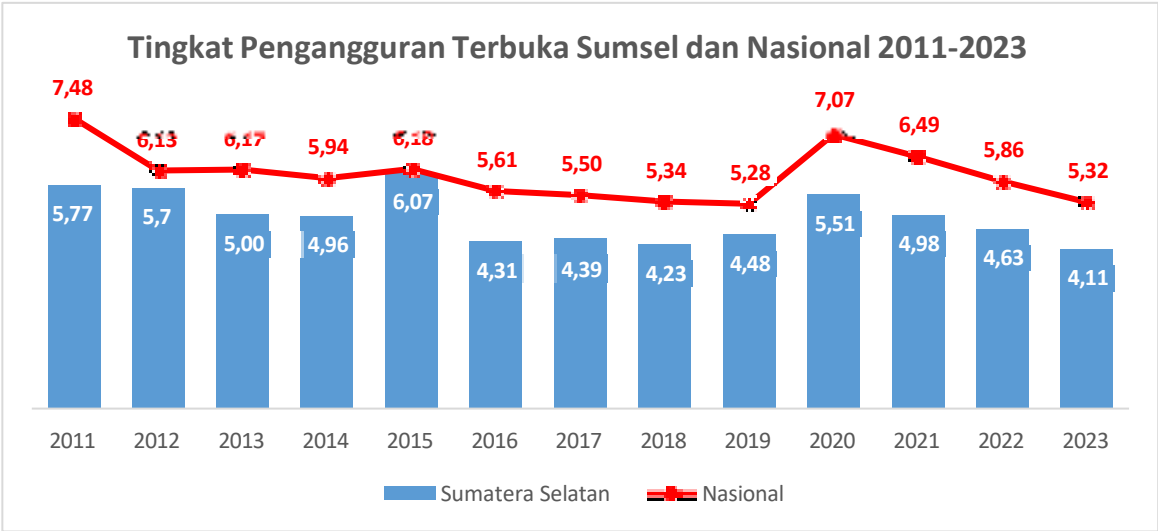
Sumber: Data Estimasi, Kemenko PMK RI, 2023

Adapun jumlah keluarga miskin (desil 1) di Sumatera Selatan sebanyak 251.779 Rumah Tangga atau sebanyak 1.182.182 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah rumah tangga miskin atau individu miskin (desil 1) paling banyak secara jumlah berada di Kota Palembang (37.447 RT/182.637 jiwa), Banyuasin (24.704 RT/117.428 jiwa) serta Kabupaten OKI (21.983 RT/100.247 jiwa).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2023 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,48 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,74% di tahun 2022 dan 4,11% di tahun 2023. Hal tersebut seiring dengan capaian TPT nasional di tahun 2022 dan 2023 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011-2023 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 3. 7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan
Tahun 2010-2023



Sumber: BPS, 2023

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2023 sebanyak 188,51 ribu orang atau berkurang sebanyak 19,75 ribu orang dari Agustus 2022 sebesar 208,26 ribu orang.

7.2. *Kondisi Angkatan Kerja*

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 4,39 juta orang penduduk yang bekerja dan 188,51 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 90,21 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 109,96 ribu orang sedangkan pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 19,75 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 189,26 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebesar 219,95 ribu orang dan pengangguran berkurang sebesar 30,69 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mengalami peningkatan sebanyak 90,21 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 70,72 persen pada Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022 (69,31 persen). Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan

penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,39 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,54 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 39,68 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 11,39 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2021 maupun Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (2,73 persen poin), SMP (0,53 persen poin), dan Diploma (0,08 persen poin).

Gambar 3. 8
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang
Ditamatkan di Provinsi Sumatera SelatanF



Sumber: BPS Sumsel, 2023

Bila dibandingkan Agustus 2021 kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja juga turun pada pendidikan SD (1,22 persen poin), SMP (1,08 persen poin), SMK (0,07 persen poin) dan Diploma (0,28

persen poin). Peningkatan kontribusi yang cukup besar terdapat pada penduduk bekerja dengan pendidikan SMA sebesar 1,72 persen dan Universitas dengan peningkatan sebesar 0,93 persen.

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/ pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Gambar 3. 9
Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal
Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel, 2023

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha

sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,77 juta orang (62,97 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,63 juta orang (37,03 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan 0,31 persen.

3.1.2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan belanja pemilu pada tahun politik serta kondisi cuaca yang lebih kondusif serta melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan memakan waktu yang lebih lama dan bahkan sulit untuk sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19. Resiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi terus berlanjut, termasuk dampaknya terhadap naiknya harga energi dan pangan, serta lebih lamanya pengetatan kebijakan moneter khususnya dinegara maju untuk mampu menurunkan inflasi kembali ke sasarannya di masing-masing negara. Untuk mengatasi tinggi dan dampak buruknya ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tidak hentinya menyuarkan perlunya penguatan koordinasi dan bauran kebijakan dalam berbagi forum internasional. Dalam forum G20 dan IMF, Indonesia selalu meminta perlunya penguatan koordinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam lingkup ASEAN, keketuaan Indonesia tahun 2023 mencapai kesuksesan dalam transformasi agenda-agenda penting untuk memperkuat ekonomi dan keuangan kawasan, tidak hanya untuk lebih tahan dalam menghadapi goncangan global tetapi menjadi pusat pertumbuhan dunia

Ditengah perlambatan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan diperkirakan tumbuh menguat pada tahun 2024. Kinerja ekonomi nasional yang diperkirakan terus membaik

terutama ditopang oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan yang kuat. Ekonomi Sumatera Selatan yang tetap kuat seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif pada Februari 2024 serta pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024. Hal ini mendorong peningkatan permintaan domestik dari sisi pengeluaran serta terus membaiknya kinerja Lapangan Usaha (LU) terutama industri pengolahan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh 5,74 persen yang didukung oleh perbaikan hampir seluruh komponen pengeluaran serta membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi serta industri pengolahan.

Tabel 3.10
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 TW1 dan TW1 2024

Lapangan Usaha		2023	2023		Triw I-2024
			Triw I	Triw IV	
(1)			(5)	(6)	
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,10	13,45	12,30	13,85
B.	Pertambangan dan Penggalian	26,61	25,88	25,24	23,19
C.	Industri Pengolahan	17,84	18,01	18,44	18,73
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,13	0,13
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	10,69	10,92	11,17	11,25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,45	13,53	13,89	14,05
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,46	2,40	2,57	2,47
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,91	1,85	2,03	1,96
J.	Informasi dan Komunikasi	2,90	3,01	2,97	3,07
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,07	2,10	2,13	2,24
L.	Real Estat	2,87	2,97	2,93	3,02
M,N.	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,12
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	2,27	2,45	2,38
P.	Jasa Pendidikan	2,03	1,97	2,16	2,09
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,60	0,61	0,62	0,62
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,69	0,70	0,74	0,72
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,19 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,73 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,85 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 55,77 persen.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan 2023 TW1 (persen)

Lapangan Usaha	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Triw I-2024 Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2024 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-12,38	9,43	1,92	2,06	0,34
B. Pertambangan dan Penggalian	-6,28	-5,64	5,20	4,12	0,89
C. Industri Pengolahan	1,53	0,67	5,04	4,66	0,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	-2,87	7,66	8,07	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,76	-0,53	3,06	2,52	0,00
F. Konstruksi	4,40	0,16	6,82	7,01	0,76
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,66	-0,04	7,17	6,81	0,79
H. Transportasi dan Pergudangan	2,42	-3,08	4,36	2,72	0,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	-4,32	13,56	9,65	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	3,95	2,43	4,11	6,12	0,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	3,60	8,41	10,17	0,23
L. Real Estat	3,22	2,11	5,05	6,51	0,22
M,N. Jasa Perusahaan	2,89	-1,02	3,92	3,96	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,15	-3,94	-0,02	9,97	0,28
P. Jasa Pendidikan	6,94	-6,93	3,64	4,94	0,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	-0,17	-0,26	3,67	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,96	-3,82	2,62	4,92	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,90	0,02	4,94	5,06	5,06

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Dengan melihat kondisi pada TW-1 tahun 2024 ini maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat di tahun 2024 serta di perkirakan tumbuh sebesar 5,74% didukung oleh inflasi yang melandai dan masuk kekisaran target. Inflasi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan masih

terkendali dan akan kembali ke kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi 2024 diperkirakan terkendali pada seluruh kelompok, terutama bahan pangan seiring dengan terjaganya inflasi bahan makan yang diperkrikan tidak terlepas daru upaya pengendalian inflasi termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong implementasi GPISS dengan melakukan pasar murah secara rutin disetiap daerah untuk menjaga harga pangan. Kegiatan tersebut digencarkan dalam rangka meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kendali agar bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal. Selain itu, upaya pengendalian inflasi *volatile food* juga dilakukan melalui berbagai program GNPIP diantaranya pemeberian bantuan alat mesin pertanian, pemberian bibit tanaman, optimaliasi program kerjasama atar daerah (KAD), serta penguatan *digital farming*.

Dengan berbagai perkembangan diatas serta berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, inflasi Sumatera Selatan tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen.

Strategi Perekonomian Daerah Tahun 2025

Pemulihan ekonomi Sumatera Selatan akan terus berlanjut dan menjadi penopang ekonomi wilayah Sumatera.

	PENDORONG	PENAHAN
2023	- Berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah dan swasta - Akselerasi mobilitas pasca dicabutnya PPKM dan terbentuknya <i>herd immunity</i>	- Penurunan harga komoditas global - Dbataalkannya FIFA U-20 - Kekeringan panjang - Berakhirnya Diskon PPnBM - Penyesuaian kebijakan ekspor dan DMO
2024	- Perbaikan <i>ease of doing business</i> - Pemilihan Umum - Cuaca yang relatif lebih terkendali - Pembangunan Pelabuhan Tj. Carat	- Peningkatan tensi geopolitik berdampak pada volatilitas harga dan nilai tukar - Krisis <i>real estate</i> di Tiongkok
2025	- Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran - Perbaikan dan penambahan infrastruktur	Akselerasi upaya transisi ekonomi hijau seiring dampak perubahan iklim dapat menahan permintaan komoditas unggulan ekspor Sumsel

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, 2023

3.1.2.3 Perkiraan Makro Ekonomi Sumsel 2025

Tahun 2025 kondisi perekonomian diperkirakan mendapat pengaruh dari tahun 2024 yang merupakan tahun transisi status COVID-19 dari pandemi menjadi endemik. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan pulih, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, membaiknya kondisi ekonomi masih dibayangi oleh ketidakpastian global terutama akibat tensi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sehingga berpotensi menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2025

Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 antara lain :

1. Masih tingginya kontribusi dari sektor pertanian dan sektor pertambangan
2. Hilirisasi komoditas unggulan yang masih belum optimal
3. Kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan meningkat
4. Penyerapan tenaga kerja terbesar ada di sektor pertanian yaitu sebesar 46,44% dari total tenaga kerja sektor perdagangan sebesar 16,20%
5. Perkembangan ekonomi di provinsi lain yang sama-sama saling tumbuh dan berkembang
6. Dinamika ekonomi negara lain, khususnya negara tujuan ekspor

Beberapa peluang dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan:

1. Potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan berlimpah khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini yang menyebabkan Sumatera Selatan dinobatkan sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional karena memiliki berbagai komoditas unggulan pada sektor ini. Dengan luas lahan didominasi oleh perkebunan karet dan kelapa sawit.
2. Sektor pertambangan yang masih mendominasi dengan cadangan batubara yang masih sangat besar di Sumsel, sehingga mendorong

untuk dibangun infrastruktur logistic batubara melalui jalur darat, kereta maupun air.

3. Permintaan global terhadap komoditas Sumsel masih tinggi
4. Tersedianya infrastruktur penghubung dengan Provinsi lain seperti jalan tol yang menghubungkan dengan provinsi Lampung serta jalan tol yang masih berproses yaitu Betung-Jambi secara langsung dapat mengerakan geliat perekonomian Sumatera Selatan Hilirisasi komoditas dari sektor pertanian
5. Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan, potensi sektor pariwisata yaitu pada wisata religi dan kuliner yang sangat beragam
6. Jumlah angkatan kerja relatif tinggi di Sumatera Selatan sehingga menjadi daya tarik investor maupun perusahaan untuk dapat mencari tenaga kerja sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan

Untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut maka diperlukan strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran makro pembangunan yaitu:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi di sektor pertanian ke arah diversifikasi dan diferensiasi produk
- 2) Mengoptimalkan potensi Sumsel sebagai lumbung pangan : Sumsel swasembada pangan/beras
- 3) Membuat/memanfaatkan roadmap hilirisasi antara lain dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan
- 4) Melibatkan stakeholders (terutama pihak investor) dalam membuat perencanaan pengembangan sektor, misalnya hilirisasi
- 5) Mengoptimalkan konektivitas antara kabupaten/kota di wilayah Sumsel lain terutama terkait dengan program seperti OVOP
- 6) Mengoptimalkan konektivitas antara wilayah terutama di pulau Sumatera terkait dengan pembangunan kawasan industri
- 7) Mempersiapkan SDM Sumsel sesuai dengan kebutuhan pasar terutama dalam aspek Teknologi Informasi dan AI
- 8) Meningkatkan peran UMKM di pasar lokal dan nasional

Secara detail strategi dan arah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran makro pembangunan yaitu:

Tabel 3.12
Strategi dan arah kebijakan untuk peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS)	• Meningkatkan Pengawasan Dengan Penguatan Pasokan Dan Distribusi Bahan Pangan, melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang efektif)
2.	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial	• Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal dalam rangka pengurangan kemiskinan dan perluasan akses kesempatan kerja, pelayanan Pendidikan dan kesehatan • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program perlindungan social
3.	Pengembangan Wisata	• Mengembangkan wisata alam Dempo Park • Pengembasan wisata Dana Ranau • Mengembangkan Sport Toursim Kota Palembang • Mengembangkan wisata kuliner yang berstandar nasional serta bersertifikat Halal • Mengembangkan wisata religi • Mengembangkan dan penguatan destinasi wisata baru sesuai dengan kultur dan potensi daerah • Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata
4.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang sehat dan kondusif	• Memberikan kemudahan dan penyederhanaan perijinan investasi berbasis Online • Menyediakan prasarana dan sarana pendukung investasi • peningkatan kepastian usaha • promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur. •
5.	Percepatan pembangunan infra aksesibilitas dan konektivitas	• Memastikan kelancaran Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim, Bedungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang, Jaringa Irigasi Lempuing, Tol Kayuagung- Palembang- Betung, Tol Betung-Tebino-Jambi. • Pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU maupun skema pembiayaan lainnya sesuai aturan yang berlaku
6.	Peningkatan investasi di sektor Industri	• Percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat • Mendorong energi terbarukan (gasifikasi batubara). Transformasi energi

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
7.	Penguatan Sektor Kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada Pelaku Ekonomi	• Peningkatan akses pelayanan Rumah Sakit bagi masyarakat umum • Peningkatan upaya promotive dan preventif hidup sehat • Pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan dan SDM Kesehatan
8.	Peningkatan mutu dan daya saing hasil UMKM	• Meningkatkan standar mutu UMKM agar naik kelas • Mengembangkan teknologi produksi • Melakukan pelatihan bagi UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih efisien, inovatif dan kompetitif
9.	Peningkatan perdagangan hasil UMKM	• Meningkatkan kualitas mutu produk yang sesuai standar • Memperluas jaringan distribusi dan pemasaran UMKM
10.	Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan	• Mengembangkan industri hilirisasi terutama pada komoditas karet, sawit
11.	Pengembangan ekspansi kinerja ekspor di luar komoditas unggulan	• Meningkatkan ekspor Sumsel dari komoditas lainnya seperti kopi, sawit, karet, kelapa (CCO)
12.	Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah	• Optimalisasi sumber-sumber pendapatan pendapatan daerah. • Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu • Peningkatan pelayanan pajak yang terpadu. • Optimalisasi belanja pada kegiatan yang prioritas dan strategis

Tabel 3.13
Share Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

Lapangan Usaha	Distribusi Sektoral								Proyeksi*	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,13	16,7	15,8	14,84	14,48	15,17	14,71	13,23	13,14	14,67
B. Pertambangan dan Penggalian	21,81	19,71	19,24	20,17	20,33	18,32	21,03	27,64	27,43	24,97
C. Industri Pengolahan	18,36	18,94	19,56	19,51	19,37	19,73	19,08	17,5	17,74	19,68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,12	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,13	0,15	0,16
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,1	0,12	0,12
F. Konstruksi	12,58	13,1	13,24	12,99	12,55	12,53	11,92	10,64	10,26	9,40
Mobil dan Sepeda Motor	10,58	11,68	12,43	12,95	13,54	13,71	13,47	12,95	13,27	13,43
H. Transportasi dan Pergudangan	2,08	2,21	2,31	2,37	2,48	2,35	2,13	2,21	2,31	2,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,56	1,64	1,76	1,97	1,87	1,81	1,77	1,87	1,93
J. Informasi dan Komunikasi	2,5	2,66	2,78	2,85	2,91	3,29	3,21	2,9	3,27	3,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,66	2,63	2,54	2,36	2,39	2,38	2,08	2,05	2,18
L. Real Estat	2,81	1,99	3,03	3,08	3,19	3,34	3,24	2,9	2,72	2,47
M,N. Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	0,11	0,12	0,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	3,46	3,16	2,85	2,67	2,9	2,77	2,46	2,28	2,11
P. Jasa Pendidikan	2,7	2,62	2,47	2,36	2,35	2,4	2,37	2,07	2,02	2,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,61	0,62	0,59	0,62	0,72	0,7	0,62	0,77	0,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,76	0,74	0,73	0,76	0,79	0,86	0,8	0,7	0,78	0,79
Produk Domestik Regional Bruto	99,63	98,95	100,01	100	100	100	100,02	100,01	100,31	100,55

Sumber: FGD Proyeksi Ekonomi Makro Sumsel (BAPPEDA, BPS, BI DAN AKEDEMISI), 2023

Dengan berbagai strategi arah kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan maka **Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2025 ditargetkan pada kisaran 5,3-5,5%.**

Inflasi pada tahun 2025 diharapkan tetap terjaga pada kisaran **2,5±1%** dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Serta dengan tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerkaan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Kondisi **Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 3,83–3,95% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 9,37–10,37%.** Salah satu indikator untuk mengukur penduduk yang menganggur yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Untuk itu diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, adanya

program pembekalan keterampilan juga dapat menjadi modal bagi pencari kerja untuk membuka lapangan usaha baru.

Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,316-0,320 dimana Kondisi perekonomian Sumsel yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata.

Tabel 3.14
Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

INDIKATOR MAKRO	2023			2024	2025
	Target RKPDP	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPDP	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,5	5,08	5,05	5,74	5,3-5,5
Inflasi (%/tahun)	2-4	3,17	2,61	2,5 ± 1	2,5 ± 1
Tingkat Kemiskinan (%)	11,59-12,66	11,78	9,36	10,95	9,37-10,37*
Tingkat Pengangguran (%)	3,06-4,22	4,11	5,32	4,14	3,83-3,95*
Gini Ratio	0,350	0,338	0,388	0,324	0,316 - 0,320*
Indeks Pembangunan Manusia	73,09	74,39	73,55	71,63	71,96

Sumber : Sumber Proyeksi: RPD Sumatera Selatan Tahun 2024-2026; *Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang, 5 Maret 2024

Tabel 3.15
Laju PDRB ADHK Per Sub Kategori (Persen)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

Kategori Utama Periode 2021-2025	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
A. Konsumsi, Akumulasi, dan Pendanaan	2.8%	4.3%	2.3%	3.6%	3.3%
B. Pertumbuhan dan Pengalihan	1.4%	1.2%	7.3%	7.3%	7.3%
C. Investasi Regulasi	2.3%	1.3%	6.4%	5.3%	5.3%
D. Pengalihan Regulasi	1.3%	1.3%	4.3%	3.3%	3.3%
E. Pengalihan Regulasi (Pengalihan Regulasi, Investasi, dan Investasi)	-1.3%	1.3%	1.3%	3.3%	3.3%
F. Investasi	-1.3%	1.3%	6.3%	7.3%	7.3%
G. Pertumbuhan Regulasi dan Investasi (Pengalihan Regulasi dan Investasi)	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
H. Investasi dan Investasi	-1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
I. Investasi dan Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
J. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
K. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
L. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
M. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
N. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
O. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
P. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
Q. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
R. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
S. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
T. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
U. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
V. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
W. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
X. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
Y. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%
Z. Investasi dan Investasi	1.3%	1.3%	7.3%	7.3%	7.3%

Sumber : Data BPS Sumsel (data diolah)

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui RKPD Tahun 2025, pemerintah Sumsel berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan daerah melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam penentuan proyeksi kerangka

pendanaan tahun 2025 maka akan dilihat dulu bagaimana kinerja keuangan periode sebelumnya sehingga penetapan target juga melihat hasil capaian pada periode sebelumnya. Secara umum, kerangka pendanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp7.368.627.067.617,27, mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp10.946.788.597.685,00, turun sebesar Rp3.578.161.530.067,73 atau -32,69 persen. Penurunan Pendapatan tersebut disebabkan antara lain penurunan Pajak Daerah sebesar -19,66%, Bagi Hasil Pajak sebesar -13,68% dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar -49,83%, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dialokasikan karena menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana transfer pusat.

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Melalui berbagai upaya untuk mempertahankan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD, maka diharapkan target PAD Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai. Proyeksi PAD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sejumlah Rp.3.719.110.730.617,27 mengalami penurunan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 4.760.692.664.094,00 atau berkurang sejumlah Rp.1.041.581.933.476,73 atau -21,88 persen. Penganggaran

pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah dialokasikan sejumlah Rp.3.455.648.357.907,77.
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah dialokasikan sejumlah Rp.5.213.358.400,00.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dialokasikan sejumlah Rp.92.000.014.309,50.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah dialokasikan sejumlah Rp.166.249.000.000,00.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

a. Pajak Daerah:

- 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pencatatan, pemungutan, penagihan dan pengelolaan pajak daerah;
- 2) Memperkuat proses tata kelola pajak daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait pajak daerah beserta aturan pendukungnya;
- 3) Meningkatkan penggunaan teknologi informatika untuk mempersingkat prosedur dan waktu layanan serta mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC, QRIS dan pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan dan pelatihan substantif dan penjenjangan;
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan layanan publik pada pelayanan pajak daerah di UPTB;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, OPD terkait

seperti DPMPTSP, BPKAD, Dinas Pengelolaan SDA dan OPD penghasil retribusi serta OPD lainnya.

- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak melalui inovasi dan terobosan pelayanan menuju pelayanan prima;
- 8) Meningkatkan pemanfaatan beragam sosial media untuk penyebaran informasi dan sosialisasi pajak daerah.
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi perpajakan daerah baik untuk kesamsatan maupun non kesamsatan;
- 10) Meningkatkan kualitas pengawasan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melakukan koordinasi dan sinergitas dengan institusi pengawasan lainnya;
- 11) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi dari UPTB tentang pentingnya pembayaran pajak daerah;
- 12) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;
- 13) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti Samsat Desa/Kelurahan dan Samsat Drive Thru;
- 14) Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi terkait seluruh aplikasi perpajakan daerah yang saling terintegrasi guna keakuratan dan penyajian data real time yang informative bagi seluruh stake holder;
- 15) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), dengan melakukan kunjungan, pendataan, pengawasan dan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada dalam pengelolaan badan /unit usaha potensial diwilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- 16) Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
- 17) Melakukan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif dengan pola Door to Door.
- 18) Meningkatkan peran serta showroom asosiasi penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan OPD pemungut retribusi;
- 2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian retribusi daerah pada masing-masing OPD penghasil retribusi;
- 4) Meningkatkan peran serta OPD peghasil retribusi dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan pelayanan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dikenakan retribusi daerah.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD penghasil retribusi daerah dalam rangka optimalisasi.
- 6) Peningkatan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

- 7) Memperkuat proses tata kelola retribusi daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait retribusi daerah beserta aturan pendukungnya,
- 8) Mempercepat dan mengoptimalkan pemanfaatan eletronikfikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan transsaksi nontunai berupa EDC dan QRIS,
- 9) Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
- 10) Menggali objek pemungutan retribusi baru;

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah melalui :
 - a) Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;

- b) Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;
- c) Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;
- d) Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Business Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
- e) Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
- f) Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
- g) Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;

- 4) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - a) Membenahi sistem administrasi menjadi sistem online dan tersentral pusat kontrolnya.
 - b) Memaksimalkan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.2. Pendapatan Transfer

Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:
 - a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;
 - c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sejumlah Rp.3.645.773.084.000,00. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

A.1 Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak dialokasikan sejumlah Rp.1.895.528.153.000 mengalami penurunan bila dibanding APBD tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp.3.226.356.902.991,00 atau berkurang Rp.1.330.828.749.991,00.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sejumlah Rp.1.750.244.931.000,00. Arah Kebijakan DAU di Tahun 2025 meliputi, sebagai berikut:
 - a) menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
 - b) mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
 - c) menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan
 - d) mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 belum dialokasikan karena menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana transfer pusat. Berdasarkan RKP maka Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2025 antara lain:
 - a) mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui

penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;

- b) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh; mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
- c) Mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;
- d) memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
- e) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
- f) mengukur capaian hasil jangka pendek(immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;
- g) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
- h) mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD

Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a) mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b) memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
- c) mendorong penuntasan target PN;
- d) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;

- e) meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2025 tidak dialokasikan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan mempertahankan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
- b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan, antara lain melalui:
 - i. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 - ii. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 - iii. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-

masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

- d. Mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sejumlah Rp.3.743.253.000,00 sama dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2024. Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD(Rp)	Proyeksi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	9.611.291.244.667,17	10.036.955.961.132,70	9.547.779.371.502,99	10.946.788.597.685,80	7.368.627.067.617,27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.865.463.033.085,17	4.930.954.855.677,74	4.875.950.557.289,99	4.760.692.664.894,80	3.719.110.730.617,27
A	Pencapaian Pajak Daerah	3.523.785.342.246,24	4.461.352.465.006,25	4.287.465.538.999,46	4.331.394.172.077,00	3.465.648.357.587,77
B	Pencapaian Retribusi Daerah	8.333.749.136,00	12.385.135.716,25	12.477.057.295,00	10.742.574.923,00	5.213.358.483,00
C	Pencapaian Hasil Pengalokasian Kebijakan Daerah yang Dilaksanakan	65.714.183.669,07	153.832.882.582,11	223.885.947.856,00	155.697.917.094,00	92.008.034.389,50
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	266.649.757.873,86	394.594.352.371,13	352.121.033.139,53	292.948.000.000,00	166.248.000.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.712.683.072.712,00	5.090.893.999.526,80	4.667.846.127.537,00	6.182.352.680.591,80	3.645.773.084.000,00
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.712.683.072.712,00	5.090.893.999.526,80	4.667.846.127.537,00	6.182.352.680.591,80	3.645.773.084.000,00
A.1	Dana Perimbangan	5.712.683.072.712,00	5.029.223.442.526,80	4.667.846.127.537,00	6.182.352.680.591,80	3.645.773.084.000,00
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		2.442.737.296.996,00	1.654.567.347.879,00	755.499.964.000,00	666.778.781.000,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak				2.490.896.358.991,00	1.254.748.372.000,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.583.041.287.000,00	1.653.765.188.000,00	1.750.244.331.000,00	1.750.244.931.000,00
A.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)		2.003.445.118.526,80	2.359.533.182.718,00	2.386.652.346.600,00	2.386.652.346.600,00
A.2	Dana Bantuan Operasional Pemerintah					
A.3	Dana Bantuan Sosial					
A.4	Dana Bantuan Operasional Pendidikan					
A.5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan					
A.6	Dana Bantuan Operasional Sosial					
A.7	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.8	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.9	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.10	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.11	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.12	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.13	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.14	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.15	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.16	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.17	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.18	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.19	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.20	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.21	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.22	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.23	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.24	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.25	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.26	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.27	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.28	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.29	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.30	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.31	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.32	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.33	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.34	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.35	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.36	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.37	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.38	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.39	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.40	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.41	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.42	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.43	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.44	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.45	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.46	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.47	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.48	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.49	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.50	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.51	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.52	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.53	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.54	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.55	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.56	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.57	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.58	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.59	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.60	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.61	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.62	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.63	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.64	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.65	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.66	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.67	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.68	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.69	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.70	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.71	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.72	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.73	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.74	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.75	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.76	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.77	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.78	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.79	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.80	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.81	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.82	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.83	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.84	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.85	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.86	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.87	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.88	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.89	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.90	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.91	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.92	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.93	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.94	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.95	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.96	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.97	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.98	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.99	Dana Bantuan Operasional Lainnya					
A.100	Dana Bantuan Operasional Lainnya					

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data diolah)

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Belanja operasi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.98.501.345.925,00 mengalami penurunan 14,00% dibanding tahun 2024 yang sebesar 5.242.340.559.164,-, belanja operasi tahun 2025 tersebar dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp2.278.540.144.829,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp2.129.096.862.526,-, serta belanja hibah sebesar Rp190.864.338.570,-.

Belanja Modal

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja modal yang menghasilkan aset dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal tersebut tersebar untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal selama periode 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2025 Belanja Modal diproyeksikan menjadi Rp949.270.874.438,-.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi belanja tidak terduga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cenderung fluktuatif, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sejumlah Rp.200.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah, yang digunakan untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi, bantuan sosial korban bencana alam, serta pengembalian kesalahan/kelebihan setor kepada pihak ketiga.

Belanja Transfer

Belanja transfer/bantuan keuangan merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. Belanja transfer Provinsi Sumatera Selatan digunakan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Proyeksi Belanja Transfer Tahun 2025 menjadi Rp.1.910.165.923.942,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan penurunan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota yang menjadi Rp1.385.725.227.045,- dan penurunan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang menjadi sebesar Rp.524.440.696.897,-.

Tahun 2025 proyeksi belanja sejumlah Rp.7.657.938.144.305,00. Dimana kebutuhan belanja ini diarahkan untuk pembiayaan dan pemenuhan pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sesuai dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”.

Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan.
- d. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- e. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan atau desa.
- f. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- 1) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;
 - 2) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 4) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%; dan
 - 5) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.
- h. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.
- i. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur untuk diverifikasi oleh perangkat daerah provinsi sesuai kriteria yaitu:
- 1) Sesuai kemampuan keuangan daerah
 - 2) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penurunan angka kemiskinan
 - 3) Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar/ Publik kabupaten/kota

- 4) Mendukung peningkatan/pembangunan yang menjadi Prioritas Daerah kabupaten/kota
 - 5) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di kabupaten/kota antara lain: Jalan, Jembatan, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan daerah lainnya
 - 6) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penyelesaiannya
 - 7) Keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD, dan/atau
 - 8) Aspirasi masyarakat hasil kunjungan kerja Gubernur di kabupaten/kota.
- j. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- k. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
- 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- l. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- m. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- n. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
- o. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Pengalokasian belanja untuk membiayai 4 prioritas daerah RKPD 2025 yang dijabarkan ke dalam program prioritas daerah.Uraian realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023 serta dan belanja daerah tahun 2024 dan 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	RKPD(Rp)	Proyeksi (Rp)
2	BELANJA DAERAH	10.589.755.508.535,48	9.663.575.726.758,69	9.698.252.960.233,98	11.161.869.674.373,00	7.657.938.144.305,00
1.	BELANJA OPERASI	5.365.031.503.748,48	4.499.276.793.174,07	4.975.235.915.372,77	5.242.346.559.164,00	4.598.501.345.925,00
A.	Belanja Pegawai	1.923.263.543.702,53	2.032.571.358.576,00	2.167.115.137.939,03	2.671.071.799.813,03	2.278.540.194.825,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	1.811.895.253.477,43	2.042.275.960.380,07	2.445.532.045.847,87	1.967.652.623.857,03	2.129.246.960.526,00
C.	Belanja Bangun	780.586.616,53	13.227.896.524,00	8.807.133.293,03	2.783.093.093,03	
D.	Belanja Subsidi					
E.	Belanja Hibah	1.628.473.647.676,03	351.202.162.880,00	376.773.688.135,03	561.555.028.134,03	193.854.338.570,00
F.	Belanja Bantuan Sosial				10.101.093.093,03	
	Belanja Bantu Pemerintah					
	Pengembangan Program					
2.	BELANJA MODAL	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
A.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
B.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
C.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
D.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
E.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
F.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
G.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
H.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
I.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
J.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
K.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
L.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
M.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
N.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
O.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
P.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
Q.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
R.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
S.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
T.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
U.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
V.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
W.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
X.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
Y.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00
Z.	Belanja Modal	1.836.834.114.021,94	1.536.378.414.085,28	1.286.731.888.808,89	1.435.351.916.119,00	949.279.874.438,00

Sumber: TAPD (data diolah), 2024

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dimana Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp.289.311.076.688,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 tidak dianggarkan, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD(Rp)	Proyeksi (Rp)
3	PEMBIAYAAN	703.159.551.422,81	354.251.259.039,14	436.744.445.834,19	424.311.076.688,00	289.311.076.688,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	615.159.551.422,81	151.894.031.565,14	322.921.821.755,13	289.311.076.688,00	289.311.076.688,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	88.000.000.000,00	202.357.225.474,00	113.822.624.079,00	135.000.000.000,00	-

Sumber: TAPD (data diolah), 2024

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan didukung juga dari program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, selain dari APBD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

3.3.1. APBD Kabupaten/Kota

Total APBD 17 Kabupaten/Kota sangat signifikan bila dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Optimalisasi pemanfaatan APBD 17 Kabupaten/Kota amatlah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Arah kebijakan pembangunan daerah terkait optimalisasi APBD di 17 Kabupaten/Kota adalah sinkronisasi dan sinergi RKPD provinsi dengan RKPD 17 kabupaten/kota. Dengan demikian, target-target makro pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dikawal pencapaiannya melalui tahapan evaluasi RKPD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Sebaliknya, pencapaian target-target RPJMD Kabupaten/Kota juga dapat didukung dana APBD Provinsi karena RKPD Kabupaten/Kota telah sinkron dengan RKPD Provinsi. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menyusun RKPD masing-masing sesuai dengan RPJMD masing-masing. Namun demikian, tersedia tahapan untuk sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota dengan RKPD Provinsi melalui mekanisme yang telah diatur Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tahapan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

Realisasi APBD 17 Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kabupaten / Kota	2023	
	Pendapatan	Belanja
Ogan Komering Ulu	Rp 1.443.040.462,01	Rp 1.233.792.104,52
Ogan Koomering Ilir	Rp 2.483.624.534,02	Rp 2.134.483.098,50
Muara Enim	Rp 2.852.960.415,80	Rp 2.535.788.020,96
Lahat	Rp 2.440.902.177,87	Rp 1.994.495.505,02
Musi Rawas	Rp 1.693.391.505,69	Rp 1.698.725.332,52
Musi Banyuasin	Rp 3.594.442.133,05	Rp 3.285.531.945,66
Banyuasin	Rp 2.220.194.953,50	Rp 1.950.409.320,57
OKU Selatan	Rp 1.198.013.341,56	Rp 1.239.752.929,38
OKU Timur	Rp 1.912.099.117,74	Rp 1.883.635.002,96
Ogan Ilir	Rp 1.273.705.291,93	Rp 1.108.497.402,46
Empat Lawang	Rp 1.144.459.693,23	Rp 908.458.408,16
Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 1.164.073.152,65	Rp 1.288.612.743,51
Musi Rawas Utara	Rp 1.043.184.864,41	Rp 1.038.440.785,82
Palembang	Rp 3.726.045.316,97	Rp 3.471.088.556,81
Prabumulih	Rp 878.307.964,38	Rp 891.269.371,00
Pagar Alam	Rp 740.022.718,49	Rp 720.087.414,55
Lubuk Linggau	Rp 871.238.278,38	Rp 876.387.520,29

Sumber: Sumsel Dalam Angka 2023

APBD 17 Kabupaten/Kota tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024
di Provinsi Sumatera Selatan

NO	KAB/ KOTA	APBD KABUPATEN/KOTA (Rp.)					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Musi Banyuasin	2.890.854.156.502,00	3.455.512.719.200,00	3.261.494.190.000,00	3.839.334.626.822	2.969.518.902.000	3.482.599.106.635,00
2	Banyuwangi	2.649.014.856.215,71	2.512.467.393.088,36	2.828.533.031.678,00	2.552.257.778.584	2.357.350.671.335	2.890.663.591.814,00
3	Musi Rawas Utara	1.064.185.405.503,00	1.130.213.916.754,00	1.061.176.890.097,00	1.106.142.335.810	1.181.296.326.677	1.541.084.766.083,00
4	Musi Rawas	2.651.840.865.002,52	2.674.872.911.800,40	2.562.723.622.539,00	3.351.065.607.003	2.829.607.156.666	n/a
5	Ogan Komering Lir	2.420.906.505.504,00	2.646.937.247.333,00	2.730.500.006.400,00	2.606.506.602.139	2.393.967.812.561	2.654.179.438.383,00
6	Luhuk Linggau	1.103.119.402.773,46	1.025.633.466.103,00	1.161.590.130.295,00	1.160.464.820.590	876.798.943.416	1.391.148.761.666,00
7	Musi Rawas	1.906.547.268.605,00	1.715.134.483.922,00	1.843.430.446.761,00	2.007.105.710.178	1.471.438.980.283	1.776.630.211.064,00
8	Pangkalpinang	2.799.000.000.000,00	2.800.000.000.000,00	2.800.000.000.000,00	-	2.800.000.000.000,00	2.800.000.000.000,00
9	APBN	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
10	Kabupaten	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
11	Kota	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
12	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
13	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
14	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
15	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
16	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
17	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
18	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
19	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
20	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
21	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
22	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
23	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
24	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
25	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
26	Provinsi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
27	Daerah	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sumsel,2024

3.3.2. APBN

3.3.2.1. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terdapat beberapa jenis APBN yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perangkat Daerah Provinsi, APBN Tugas Pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Perangkat Daerah Provinsi. Besaran APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi.

Untuk memantau realisasi APBN dan permasalahan yang mungkin timbul dan dapat menghambat realisasi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menciptakan inovasi aplikasi online e-monev yang diupdate tiap bulan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2.2. APBN pada Proyek Infrastruktur di K/L

Proyek infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dengan menggunakan dana APBN diantaranya yaitu:

Tabel 3.21
Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Usulan Proyek	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Vol	Unit	Uraian Dukungan	Indikasi K/L	OPD	Kesepakatan Musrenbangnas	Catatan
1	Subsidi Operasional LRT dan Feeder LRT	Kota Palembang	1	Kepalaan	-Laporan Pengembangan LRT -Laporan Pembiayaan Feeder LRT	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Dikomodir	
2	Pembangunan Baru Rumah Susun	Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin	3	Tower	-Prototype -Usulan -Sertifikat Tanah -Proposal -Pernyataan Dukungan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dikomodir	
3	Revitalisasi Danau Ranau	Kabupaten OKU Selatan	1	Unit	-Analisa Wilayah Perencanaan -Strategi KDR -Rencana Destinasi KDR -Indikasi Program KDR -DED	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Dikomodir	
4	Pengendalian Banjir dan pembangunan Drainase Kawasan Kota Palembang	Kota Palembang	3	Sistem	-SED -DED -Master Plan -AMDAL	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Dikomodir	
5	Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Sungai Lematang	-Kabupaten Muara Enim -Kabupaten Lahat -Kota Pagar Alam	1	Unit	DED	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Dikomodir	
6	Pembangunan Bendungan Tigathugi Kab. OKU Selatan	Kabupaten OKU Selatan	1	Bendungan	-DED -AMDAL -izin Konstruksi -Perizinan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Dikomodir	
7	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kab. OKU, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. OKU Timur, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat Lawang dan Kota Palembang	16.000	Unit	-Data Lokasi	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dikomodir	
8	Pembangunan Jembatan Pipa dan Pengembangan Jaringan Perpipaan	Kabupaten Empat Lawang	2800	SR	-DED -RAB	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Dikomodir	
9	Pengembangan Kawasan Padi	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. OKU Selatan, Kab. OKU Timur, Kab. Ogan Ilir, Kab. PALI, Kab. Muratara	43.300	Ha	-SK Kawasan -SK Masterplan -Masterplan Food Estate -Lahan pertanian beresada	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian IPH	Dikomodir	

No	Usulan Proyek	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Vol	Unit	Uraian Dukungan	Indikasi K/L	OPD	Kesepakatan Musrenbangnas	Catatan
10	Pengembangan Budidaya Jagung	Kabupaten OIJ Selatan Kabupaten OIJ Timur	2.000	Ha	+SK Kawasan +SK Masterplan +Masterplan Food Estate +Lahan pertanian tersedia	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian TPH	Diakomodir	
11	Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	17 Kabupaten/Kota	228	Unit	+SK Kawasan +SK Masterplan +Masterplan Food Estate +Lahan pertanian tersedia	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian TPH	Diakomodir	
12	Gerakan Penanaman Benih/Kekeringan	Provinsi Sumatera Selatan	500	Ha	+SK Kawasan +SK Masterplan +Masterplan Food Estate +Tersedianya lahan pertanian yang luas	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian TPH	Diakomodir	
13	Kawasan Aneka Cabi	17 Kabupaten/Kota	100	Ha	+SK Kawasan +SK Masterplan +Masterplan Food Estate +Tersedia lahan pertanian cabai	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian TPH	Diakomodir	
14	Penyediaan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin	1000	Jaringan	+MDU Kementerian ESDM	020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	BAPPEDA Kab. MUBA	Diakomodir	
15	Pembangunan Jaringan Tension Di Lematang	Pagar Alam	1	Unit	+DED +RAB	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Diakomodir	Kegiatan lanjutan dari pembangunan bendung Di Lematang
16	Rehabilitasi Bangunan Intake SPAM IKK Benakart Kab. Muara Enim	Muara Enim	1	Paket	+DED, Lahan siap	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas PSDA	Diakomodir	Rehab intake existing untuk meningkatkan kapasitas debit air baku untuk mendukung SPAM IKK
17	Pembangunan TPST Pendapa	PALU	1	Unit	+DED +Sertifikat Tanah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas Perumahan dan Kawasan	Diakomodir	Penyediaan infrastruktur pengelolaan

Sumber: Hasil Pembahasan Musrenbangnas Mei 2024

3.3.3. Pendanaan Alternatif Lainnya

Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan yanitu dengan melakukan pengembangan instrument pembiayaan pembangunan daerah, yaitu untuk membiayai proyek-proyek infratsruktur dengan mekanisme KPBU/Sawasta, maupun pembiayaan utang daerah dengan obligasi/ sukuk daerah. KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data dari website <http.kpbu.kemenkeu.go.id> proyek pembangunan yang ada di Sumatera Selatan yang didanai dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Proyek Infrastruktur	Alokasi Dana	Jumlah	PIPK	Status
		(Rp. Triliun)			
	Total.....	4.182,40	4.182,40		
1	- Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dengan Skema KPBU Kota Palembang	3.200,00	3.200,00	Kementerian Energi dan Sumber Daya	Penyiapan
2	- Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Provinsi Sumatera Selatan	922,40	922,40	Kementerian Energi dan Sumber Daya	Diperoleh

Sumber: <http.kpbu.kemenkeu.go.id>